



KEMENPKP

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI I**

TA. 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja secara periodik pada tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini disusun dengan melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran atas capaian terhadap sasaran dan target kinerja untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi triwulanan. Selain itu, Laporan ini berisi realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan kemudian dibandingkan dengan target bulanannya.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang sebelumnya adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, saat ini merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tiga wilayah cakupan kerja yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo yang dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki tugas Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penetaan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas seah terima asset.

Pelaksanaan paket pekerjaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I akan dilakukan pemantauan secara berkala perbulan dengan dokumen rencana aksi sebagai dasarnya. Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Triwulan II Tahun 2026 ini merupakan alat pemantauan dan evaluasi pencapaian target dalam bentuk laporan pengukuran kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulanan ini diharapkan permasalahan dan kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target dapat diantisipasi pada bulan berikutnya.

Manado, Juli 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, *4*



[Signature]
Ir. ERPIKA ANSELA SURIRA, S.T.
NIP. 19821022 200605 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	8
BAB II	10
CAPAIAN KINERJA	10
A. TARGET KINERJA TRIWULAN II BEDASARKAN DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA	10
B. CAPAIAN TARGET TRIWULAN II.....	14
C. PERMASALAHAN/ POTENSI CAPAIAN TRIWULAN.....	18
BAB III	25
PENUTUP.....	25
A. RENCANA TINDAK LANJUT	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal	4
Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	4
Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	5
Tabel 1.4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	6
Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	6
Tabel 1.6 : Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I 2026 - 2029.....	7
Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan Revisi Sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2026	10
Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal.....	11
Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jendral Kawasan Permukiman.	11
Tabel 2. 4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.	12
Tabel 2. 5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	13
Tabel 2. 6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	14
Tabel 2. 7 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Sekretariat Jenderal	14
Tabel 2. 8 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Dirjen Kawasan Permukiman	15
Tabel 2.9 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15
Tabel 2. 10 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	16
Tabel 2. 11 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	17
Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II	19

Tabel 2. 13 Rekapitulasi Capaian BSPS di lingkup Balai P3KP Sulaawesi I Tri Wulan II	24
--	----

The background features abstract geometric shapes in dark blue and gold, primarily located in the top-left and bottom-right corners. The central area is a solid light beige color where the title is placed.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang sebelumnya adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, saat ini merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tiga wilayah cakupan kerja yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo yang dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I berada dibawah 5 (lima) unit organisasi dalam kementrian perumahan dan kawasan permukiman. 5 unit organisasi tersebut berdasarkan peraturan menteri perumahan dan kawasan permukiman nomor 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
3. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
4. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
5. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I bertanggung jawab atas amanat DIPA yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dengan masing - masing unit organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I adalah sebagai berikut: "Melaksanakan penyediaan

perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas serah terima aset”.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman;
- Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

- Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

Sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PERMEN PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian PKP diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta pengukuran kinerja per triwulan dan tahunan. Adapun Sistem Kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui Upaya merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I berupaya secara terus – menerus menerapkan prinsip – prinsip perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab dalam hal ini 5 unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Kawasan permukiman, Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I selama satu tahun kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan

Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana. Dokumen Penetapan (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja suatu unit organisasi. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan Manajemen.

Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	1	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan
		2	Jumlah Layanan Umum	4 layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	4 Unit

Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 dokumen
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	4 layanan
		2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 layanan
		3	Jumlah Layanan BMN	1 layanan

Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

Tabel 1. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2.	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan
		2.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3.	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaratata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan pada

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sulawesi I 2026-2029 pada 5 (lima) Direktorat adalah sebagai berikut :

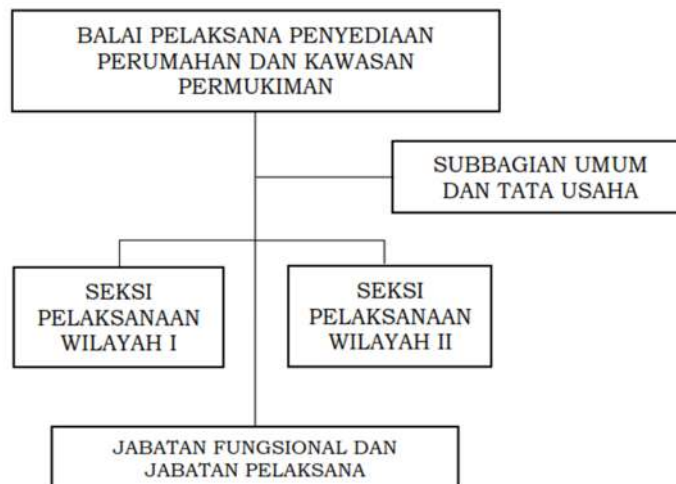
Tabel 1. 6 : Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I 2026 - 2029

Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Sasaran Strategis (SS) 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
IKSS-1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak dan Terjangkau
IKSS-2	Persentase Luas Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
IKSS-3	Persentase terwujudnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung tersedianya hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan
IKSS-4	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni
Sasaran Program (SP) 1 DJKP : meningkatkan Hunian Layak di Kawasan Permukiman	IKP 1 : Persentase Peningkatan Hunian Layak di Kawasan Permukiman (%)
Sasaran Program (SP) 2 DJKP : Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh	IKP : Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
Sasaran Program (SP) 3 DJKP : Meningkatkan Ekosistem Perumahan dan permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak	IKP : Persentase Peningkatan Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Hunian Layak (%)
Sasaran Program (SP) 4 DJPDesa: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan	IKP : Persentase Hunian Layak, Aman dan Terjangkau di wilayah Perdesaan
Sasaran Program (SP) 5 DJPKota: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	IKP : Persentase Hunian Layak, Aman dan Terjangkau di wilayah Perkotaan
Sasaran Program (SS) 6 DJTKPR: Meningkatkan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	IKP 1 : Persentase Capaian Penerapan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)
	IKP 2 : Persentase Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan (%)
Program Dukungan Manajemen	
Sasaran Strategis (SS) 2 :	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP
IKSS-1 :	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP
IKSS-2 :	Indeks Integritas Kementerian PKP
IKSS-3 :	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern
Sasaran Program (SP) 1 Sekjen: Menigkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP (%)

Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Sasaran Program (SP) 3 DJKP : Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Dsirektorat Jenderal Kawasan Permukiman (%)
Sasaran Program (SP) 4 : Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat jenderal Perumahan Perdesaan (%)
Sasaran Program (SP) 5: Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat jenderal Perumahan Perdesaan (%)
Sasaran Program (SS) 6 : Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jendral Tata Kelola dan Pengendalian Resiko	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan manajemen Direktorat Jendral Tata Kelola dan Pengendalian Resiko (%)

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan sumber daya manusia, menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, sumber daya manusia yang terkelola dengan profesional dan responsif akan melahirkan aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan ke depan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi I

Sumber : Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025

Tabel 1.7: Susunan Organisasi UPT

No.	Jabatan	Tugas
1.	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan system pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
2.	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
3.	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4.	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

The background features an abstract geometric design with various blue and gold shapes, including triangles and polygons, arranged in a dynamic, overlapping pattern. The text is centered in a bold, dark blue font.

BAB II

CAPAIAN KINERJA



BAB II CAPAIAN KINERJA

A. TARGET KINERJA TRIWULAN II BEDASARKAN DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mempunyai tugas yaitu mendukung Pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk itu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mendukung 2 (dua) program yang melekat yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan melalui 4 Satker yaitu:

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
2. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara;
3. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
4. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan DIPA Awal TA. 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki amanat menjalankan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen dengan detail pagu anggaran tiap unit organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan Revisi Sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2026

No	Unit Organisasi	DIPA Awal				Jumlah
		Satker Balai	Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara	Satker PKP Provinsi Maluku Utara	Satker PKP Provinsi Gorontalo	
1	Sekretariat Jenderal	1.114.975.000	1.260.406.000	680.024.000	755.032.000	3.810.437.000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	351.604.000	80.412.676.000	108.851.045.000	27.448.304.000	217.063.629.000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	185.087.000	20.336.274.000	-	6576.834.000	26.913.108.000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	285.956.000	37.944.849.000	17.336.386.000	6.558.585.000	62.125.776.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	101.951.000	-	-	-	101.951.000

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I bertanggung jawab terhadap Perjanjian Kinerja (PK) pada 5 (lima) unit Organisasi diantaranya Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sulawesi I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan bersama dengan Satuan Kerja memiliki tanggungjawab yang terus menerus (*in line*) dalam mencapai target Kementerian PKP.

Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1

Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jendral Kawasan Permukiman.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	-	-	-
		Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	-	-	-

Tabel 2. 4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan				
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	Dokumen	1			
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	-	-	-	-
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	-	-	-
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1		-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
	Jenderal Perumahan Perdesaan						
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	-	-	-

Tabel 2. 5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	-	-	-
		Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	-	-	-

Tabel 2. 6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	2	-	-	-
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaratata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-

B. CAPAIAN TARGET TRIWULAN II

Target kinerja triwulan I mengacu pada target Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun Anggaran 2026 dan tercantum dalam Dokumen Rencana Aksi. Hal ini merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tabel 2. 7 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	4	0	0	0
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	4	0	0	0
		Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	4	0	0	0

Tabel 2. 8 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Dirjen Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	0	0	0
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	Layanan	4	0	0	0
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0	0	0
		Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	0	0	0

Tabel 2.9 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	0	0	0
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	0	0	0
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis	Dokumen	1	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
	dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan					
		Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	0	0	0
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	-	-	-	-
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	0	0	0
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	0	0	0
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0	0	0

Tabel 2. 10 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
	dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Perumahan Perkotaan					
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	0	0	0
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	4	0	0	0
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0	0	0
		Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	0	0	0

Tabel 2. 11 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik,	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW II	Capaian TW II	Persentase Capaian (%)
	permukiman yang efektif dan akuntabel	Transparansi dan Akuntabilitas					
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dari Kebijakan	2	0	0	0
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggara tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0

C. PERMASALAHAN/ POTENSI CAPAIAN TRIWULAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pasti ada terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi dan hal tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti supaya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I sampai dengan berakhirnya Triwulan II. Untuk menjelaskan kendala dan permasalahan apa saja yang terjadi, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai kendala yang terjadi pada Triwulan II tahun anggaran 2026 yang telah dilaksanakan kegiatannya.

Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Keuangan Triwulan II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satker Balai			Satker Sulut			Satker Malut			Satker Gorontalo		
			Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi	
				Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%
DIPA SEKRETARIAT JENDERAL			1.114.375	652.292	58.53	1.260.406	468.660	37.18	680.024	387.711	57.01	755.032	351.725	46.58
Program Dukungan Manajemen			1.114.375	652.292	58.53	1.260.406	468.660	37.18	680.024	387.711	57.01	755.032	351.725	46.58
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I	Jumlah Layanan Perkantoran	1.002.758	608.176	57.81	1.197.731	406.260	33.92	630.556	345.524	54.80	706.716	313.855	44.51
		Jumlah Layanan Umum	49.325	45.252	91.74	41.911	41.876	99.92	42.918	42.187	98.30	27.552	17.106	62.09
		Jumlah Layanan Sarana Internal	62.292	44.116	70.82	20.764	20.504	98.75	6.550	0	0	20.764	20.764	100
DIPA DIRJEN KAWASAN PERMUKIMAN			351.904	184.405	52.40	80.412.676	53.629.649	66.69	108.851.045	61.227.644	56.25	27.448.304	17.430.878	63.50
Program Dukungan Manajemen			72.914	72.556	99.51	48.939	27.317	55.82	38.017	9.997	26.30	48.616	47.956	98.64
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	50.275	50.271	99.99	48.939	27.317	55.80	38.017	9.997	26.30	48.616	47.956	98.64
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	3.916	.3916	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Layanan BMN	18.723	18.368	98.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program PKP			278.990	111.848	40.09							27.399.688	17.430.878	65.50
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggara n Kawasan Permukiman	26.399	26.398	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggara n Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	153.534	49.424	32.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	99.057	36.204	36.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satker Balai			Satker Sulut			Satker Malut			Satker Gorontalo		
			Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi	
				Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%
		Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	-	-	-	6.744.808	192.880	2.86	8.892.676	152.591	1.72	-	-	-
		Jumlah Rumah Bersanitasi Layak	-	-	-	2.005.067	0	0	2.023.634	26.864	1.33	-	-	-
		Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	-	-	-	71.613.862	53.409.451	74.58	97.896.718	61.038.192	62.35	27.399.688	17.382.922	63.44
DIRJEN PERUMAHAN PERDESAAN			185.087	71.494	38,63	20.366.274	80.500	0.40	-	-	-	6.576.834	1.620.007	24.63
Program Dukungan Manajemen			8.481	4.200	49.52	-	-	-	-	-	-	16.804	5.400	32.14
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	5.853	3.000	51.26	-	-	-	-	-	-	16.804	5.400	32.14
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	2.628	1.200	45.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program PKP			176.606	67.294	38.10	20.336.274	80.500	0.40	-	-	-	-	-	-
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	110.279	26.463	22.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	42.327	27250	64.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	15.000	13.580	90.54	95.820	80.500	84.01	-	-	-	26.605.000	7.222	27.15

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satker Balai			Satker Sulut			Satker Malut			Satker Gorontalo		
			Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi	
				Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%
		Penyelenggara n Perumahan Perdesaan												
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggara n Pembangunan Perumahan Perdesaan	16.400	8.054	49.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	15.000	13.580	90.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	-	-	-	20.174	0	0	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggara n Peningkatan Kualitas	32.300	16.109	49.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satker Balai			Satker Sulut			Satker Malut			Satker Gorontalo		
			Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi	
				Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%
	perumahan di wilayah perdesaan	Perumahan Perdesaan												
		Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.533.425	1.607.384	24.60
DIRJEN PERUMAHAN PERKOTAAN			285.956	53.385	18.67	37.944.849	0	0	17.336.386	3.648.499	21.05	6.558.585	1.347.259	20.54
Program Dukungan Manajemen			44.162	23.301	52.76	8.180	0	0	7.960	7.959	99.99	12.800	0	0
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	14.480	0	0	8.180	0	0	7.960	7.959	99.99	12.800	0	0
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	14.400	8.355	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Layanan BMN	14.947	14.945	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program PKP			241.794	53.385	18.67				17.328.426	3.640.540	21.01			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggara n Perumahan Perkotaan	54.291	16.224	13.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara n Perumahan Perkotaan	25.555	0	0	28.644	7.702	26.89	13.884	5.740	41.34	15.614	5.464	34.99
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggara n Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	33.683	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggara n Pembiayaan	33.683	6.000	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satker Balai			Satker Sulut			Satker Malut			Satker Gorontalo		
			Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi	
				Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%
		Perumahan Perkotaan												
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	45.291	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah rumah Susun di Perumahan Perkotaan	-	-	-	10.706.666	16.380	0.04	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	49.291	1.410	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan				27.201.359	16.380	0.06	17.314.542	3.634.800	20.99	6.530.171	1.341.795	20.55
Dirjen TKPR			101.951	42.681	41.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program PKP			101.951	42.681	41.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	26.017	12.959	49.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	57.754	21.246	36.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman,	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa	40.736	19.826	48.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satker Balai			Satker Sulut			Satker Malut			Satker Gorontalo		
			Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi		Pagu (ribuan)	Realisasi	
				Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%		Rp (ribuan)	%
	penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaratata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	n tata kelola dan pengendalian risiko												

Tabel 2. 13 Rekapitulasi Capaian BPS di lingkup Balai P3KP Sulaawesi I Tri Wulan II

No	DIPA Unit	Satuan Kerja	Pagu (Rp Ribuan)	Realisasi sesuai SP2D (Rp Ribuan)	Jumlah Unit	Progres Fisik (Unit)				
						0%	0-30%	30%	30-100%	100%
1	Kawasan permukiman	PKP Provinsi Sulawesi Utara	66.000.000	49.260.000	2.463	1.804	547	14	97	1
2	Perumahan Perkotaan		25.000.000	6.980.000	349	189	113	2	43	2
3	Kawasan permukiman	PKP Provinsi Maluku Utara	61.500.000	59.425.000	1.583	1.583	-	-	-	-
4	Perumahan Perkotaan		16.500.000	5.765.000	182	182	-	-	-	-
5	Kawasan Permukiman	PKP Provinsi Gorontalo	24.000.000	16.420.000	821	67	236	166	346	6
6	Perumahan Perkotaan		6.000.000	1.520.000	76	29	42	5	-	-
7	Perumahan Perdesaan		6.000.000	1.340.000	67	22	27	9	9	-

The background features an abstract geometric design with various blue and gold shapes, including triangles and polygons, arranged in a modern, layered fashion. The text is centered in a bold, dark blue font.

BAB III

PENUTUP



BAB III

PENUTUP

A. RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Triwulan II pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun anggaran 2026 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Triwulan II ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi capaian yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan kendala/permasalahan apa saja yang menyebabkan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari Laporan Triwulan II ini dapat dilihat dengan jelas secara keseluruhan hasil dari realisasi yang telah dicapai dan kegiatan apa saja yang dalam pelaksanaannya berjalan sesuai target rencana dan yang belum sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga nantinya akan diketahui kendala atau permasalahan apa saja yang dihadapi dan akan dicari Solusi permasalahannya. Pada triwulan berikutnya, diharapkan semua kegiatan yang terkendala tersebut dapat diatasi dalam pelaksanaan kegiatannya dan dapat terealisasi sesuai target yang direncanakan, sehingga anggaran dapat terserap dengan baik dan kemudian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaporkan sebagai bahan untuk evaluasi pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

Tabel Permasalahan Dan Tindak Lanjut Triwulan II

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Satker Balai						
Sekretariat Jenderal						
1	Pada awal bulan Januari 2026 masih dalam tahap proses penyesuaian anggaran. Jadi, pada bulan Januari 2026 masih belum ada serapan anggaran, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan seperti biasa sambil menunggu proses penyesuaian anggaran selesai.	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan sesuai dengan rencana.	Dokumentasi, Absensi, Notulensi, dan bukti bayar lainnya.	1	Adanya dokumen keuangan yang kurang dalam dalam pelaksanaan anggaran di Tri Wulan II.	Melengkapi dokumen-dokumen keuangan yang kurang dalam pelaksanaan anggaran di Tri Wulan II.
2.	Kendala Administrasi. Selain proses penyesuaian anggaran, kendala lainnya adalah pada proses administrasi, terutama administrasi keuangan, khususnya	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan	SPM, dan bukti-bukti pembayaran lainnya			

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	pada bulan Januari 2026, administrasi keuangan juga terkendala, karena kegiatan atau pekerjaan belum bisa optimal dilaksanakan, terutama penyerapan anggaran keuangan. memasuki bulan Februari dan Maret 2026, penyerapan anggaran mulai bisa terlaksana dan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan bisa direncanakan per Triwulannya dengan menyesuaikan pada anggaran yang telah disahkan/ditetapkan.	kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan agar tujuan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah di susun.				
3.	Koordinasi dan Komunikasi terkait serah terima aset yang masih tumpang tindih di kabupaten dan kota.	Melaksanakan audiensi Bersama dengan Pemerintah kabupaten dan kota terkait Serah Terima Aset.	Dokumen Serah Terima Aset			
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
1	Pada awal bulan Januari 2026 masih dalam tahap proses penyesuaian	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan	Dokentasi, Absensi,, Notulensi, dan bukti bayar lainnya.	1	Keterbatasan alokasi anggaran belanja bahan, belanja barang non	Telah diajukan permohonan penambahan alokasi anggaran perjalanan dinas untuk

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	anggaran. Jadi, pada bulan Januari 2026 masih belum ada serapan anggaran, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan seperti biasa sambil menunggu proses penyesuaian anggaran selesai.	kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan sesuai dengan rencana.			operasional lainnya dan perjalanan dinas belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan koordinasi kepada seluruh satuan kerja di wilayah BP3KP Sulawesi I yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.	mendukung pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pada wilayah kerja BP3KP Sulawesi I yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Lewat surat Nomor KU 0602-Bp14/682 tanggal 12 Mei 2026
2	Kendala Administrasi. Selain proses penyesuaian anggaran, kendala lainnya adalah pada proses administrasi, terutama administrasi keuangan, khususnya pada bulan Januari 2026, administrasi keuangan juga terkendala, karena kegiatan atau pekerjaan belum bisa optimal dilaksanakan, terutama penyerapan anggaran keuangan. memasuki	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan agar tujuan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah di susun.	SPM, dan bukti-bukti pembayaran			

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	bulan Februari dan Maret 2026, penyerapan anggaran mulai bisa terlaksana dan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan bisa direncanakan per Triwulannya dengan menyesuaikan pada anggaran yang telah disahkan/ditetapkan.					
3	Koordinasi dan Komunikasi terkait serah terima aset yang masih tumpang tindih di kabupaten dan kota.	Melaksanakan audiensi Bersama dengan Pemerintah kabupaten dan kota terkait Serah Terima Aset.	Dokumen Serah Terima Aset			
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
1	Pada awal bulan Januari 2026 masih dalam tahap proses penyesuaian anggaran. Jadi, pada bulan Januari 2026 masih belum ada serapan anggaran, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan kegiatan rutin kantor dan	Dokumentasi, Absensi,, Notulensi, dan bukti bayar lainnya.			

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	komunikasi berjalan seperti biasa sambil menunggu proses penyesuaian anggaran selesai.	pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan sesuai dengan rencana.				
2	Kendala Administrasi. Selain proses penyesuaian anggaran, kendala lainnya adalah pada proses administrasi, terutama administrasi keuangan, khususnya pada bulan Januari 2026, administrasi keuangan juga terkendala, karena kegiatan atau pekerjaan belum bisa optimal dilaksanakan, terutama penyerapan anggaran keuangan. memasuki bulan Februari dan Maret 2026, penyerapan anggaran mulai bisa terlaksana dan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan bisa direncanakan per Triwulannya dengan	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan agar tujuan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah di susun.	SPM, laporan dan bukti-bukti pembayaran lainnya.			

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	menyesuaikan pada anggaran yang telah disahkan/ditetapkan.					
3	Koordinasi dan Komunikasi terkait serah terima aset yang masih tumpang tindih di kabupaten dan kota.	Melaksanakan audiensi Bersama dengan Pemerintah kabupaten dan kota terkait Serah Terima Aset.	Dokumen Serah Terima Aset			
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1	Pada awal bulan Januari 2026 masih dalam tahap proses penyesuaian anggaran. Jadi, pada bulan Januari 2026 masih belum ada serapan anggaran, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan seperti biasa sambil menunggu proses penyesuaian anggaran selesai.	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan sesuai dengan rencana.	Dokumentasi, Absensi,, Notulensi, dan bukti bayar lainnya.			
2	Kendala Administrasi. Selain proses	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan	SPM, dan bukti-bukti pembayaran			

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	penyesuaian anggaran, kendala lainnya adalah pada proses administrasi, terutama administrasi keuangan, khususnya pada bulan Januari 2026, administrasi keuangan juga terkendala, karena kegiatan atau pekerjaan belum bisa optimal dilaksanakan, terutama penyerapan anggaran keuangan. memasuki bulan Februari dan Maret 2026, penyerapan anggaran mulai bisa terlaksana dan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan bisa direncanakan per Triwulannya dengan menyesuaikan pada anggaran yang telah disahkan/ditetapkan.	untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan agar tujuan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah di susun.				
3	Koordinasi dan Komunikasi terkait serah terima aset yang masih	Melaksanakan audiensi Bersama dengan Pemerintah kabupaten				

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	tumpang tindih di kabupaten dan kota.	dan kota terkait Serah Terima Aset.				
Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
	Pada awal bulan Januari 2026 masih dalam tahap proses penyesuaian anggaran. Jadi, pada bulan Januari 2026 masih belum ada serapan anggaran, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan seperti biasa sambil menunggu proses penyesuaian anggaran selesai.	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan sesuai dengan rencana.	Dokumentasi, Absensi,, Notulensi, dan bukti bayar lainnya.			
	Kendala Administrasi. Selain proses penyesuaian anggaran, kendala lainnya adalah pada proses administrasi, terutama administrasi keuangan, khususnya pada bulan Januari 2026, administrasi keuangan	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang	SPM, dan bukti-bukti pembayaran			

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	juga terkendala, karena kegiatan atau pekerjaan belum bisa optimal dilaksanakan, terutama penyerapan anggaran keuangan. memasuki bulan Februari dan Maret 2026, penyerapan anggaran mulai bisa terlaksana dan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan bisa direncanakan per Triwulannya dengan menyesuaikan pada anggaran yang telah disahkan/ditetapkan.	terkait, dengan harapan agar tujuan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah di susun.				
Satker PKP Provinsi Sulut						
Sekretariat Jenderal						
1						
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
1				1	Lokasi CPB yang sulit khususnya di daerah kepulauan karena menggunakan transportasi laut dimana harus menyesuaikan dengan	Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan operator transportasi untuk memperoleh informasi jadwal pelayaran dan kondisi cuaca.

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
					kondisi cuaca ekstrim dan menunggu jadwal pelayaran kapal/tol laut. Ada juga lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan sepeda motor trail atau berjalan kaki (kurang lebih 1-2 jam) karena tidak dapat dilalui kendaraan biasa.	
2				2	Jarak tempuh ke lokasi dampingan dan satu desa ke desa lainnya dalam satu kecamatan berjauhan, bisa sampai 1 jam perjalanan.	Menyesuaikan prioritas kunjungan ke lokasi yang progresnya rendah atau mengalami kendala.
				3	Penyaluran bahan bangunan terlambat karena beberapa faktor di antaranya kelangkaan bahan bakar solar, terbatasnya ketersediaan besi yang sesuai spesifikasi, dan ketersediaan bahan baku untuk produksi hollow brick terbatas.	Melakukan koordinasi rutin dengan penyedia untuk memantau perkembangan stok material.

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
3				4	Beberapa rumah CPB yang diusulkan tidak layak menerima program BSPS (rumah layak huni).	Berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan calon penerima pengganti yang memenuhi persyaratan BSPS serta sudah masuk dalam Sibaru.
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
1	Pembayaran Pekerjaan Pembangunan dan MK Huntap Pasca Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara tertunda karena pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal	Pembayaran akan segera diproses setelah pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal selesai	SPM Pekerjaan Pembangunan dan MK Huntap Pasca Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara			
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1				1	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik CPB sulit untuk diterbitkan oleh Kelurahan	
2				2	Penyaluran bahan bangunan terlambat karena beberapa faktor di antaranya kelangkaan bahan bakar solar, terbatasnya ketersediaan besi yang sesuai spesifikasi, dan ketersediaan bahan baku	Melakukan koordinasi rutin dengan penyedia untuk memantau perkembangan stok material.

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
					untuk produksi hollow brick terbatas.	
3				3	Beberapa rumah CPB yang diusulkan tidak layak menerima program BSPS (rumah layak huni).	Berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan calon penerima pengganti yang memenuhi persyaratan BSPS serta sudah masuk dalam Sibaru.
Satker PKP Provinsi Malut						
Sekretariat Jenderal						
1						
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
2	Baru dimulainya proses Verifikasi teknis Calon Penerima Bantuan	Melakukan Verifikasi Teknis Calon Penerima Bantuan	Berita acara verifikasi, dokumentasi dan dokumen verifikasi lainnya	1	Terdapat CPB yang mengundurkan diri setelah SK diterbitkan	Berkoordinasi dengan pihak pengusul untuk pergantian CPB
				2	Terdapat toko yang sudah menang PTT namun mengundurkan diri	Dilakukan tahapan PTT kembali untuk mencari pengganti toko sebelumnya yang mengundurkan diri
				3	Kekurangan tenaga pendamping	Masih mencari alternatif agar tidak mengganggu tugas pendamping yang telah ditetapkan sebelumnya
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1	Baru dimulainya proses Verifikasi teknis Calon Penerima Bantuan	Melakukan Verifikasi Teknis Calon Penerima Bantuan	Berita acara verifikasi, dokumentasi dan dokumen verifikasi lainnya	1	Akses ke lokasi pelaksanaan BSPS sulit dijangkau karena	Mencari alat alternatif lain menuju ke lokasi BSPS tetapi memakan waktu dan kesulitan menuju ke lokasi pelaksanaan BSPS

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
					jembatan penghubung terputus	
				2	Tidak terdapat toko material disekitar desa pelaksanaan BSPS	Mencari toko material lain yang berada agak jauh dari desa pelaksanaan BSPS
				3	Terdapat CPB yang telah berpindah domisili ke luar daerah	Berkoordinasi dengan pihak pengusul untuk pergantian CPB
Satker PKP Provinsi Gorontalo						
Sekretariat Jenderal						
1	Penyerapan anggaran belum optimal karena pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan masih terbatas.	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat agar penyerapan anggaran dapat meningkat sesuai target yang ditetapkan	Laporan Perjadin, dan Laporan pertanggungjawaban lainnya.	1	Menunggu revisi POK sehingga pelaksanaan kegiatan dan proses penyerapan anggaran belum dapat dilaksanakan sesuai rencana	Melakukan percepatan proses revisi POK melalui koordinasi intensif dengan unit terkait, menyiapkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan, serta segera melaksanakan kegiatan setelah revisi POK disetujui agar penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
1	Hasil verifikasi masih di temukan beberapa calon penerima bantuan tidak memenuhi kriteria seperti tidak memiliki legalitas lahan, tidak memiliki rumah (menumpang),	Berkordinasi ke Korkab dan TFL untuk mencari calon pengganti.	Berita acara verifikasi, dokumentasi dan dokumen verifikasi lainnya	2	- Jarak antara desa/kelurahan jauh - Medan sulit dan akses terbatas	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengelompokan lokasi berdasarkan kedekatan wilayah (klaster), penjadwalan kunjungan secara efisien, serta optimalisasi koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	mempertimbangkan untuk di bantu oleh program lain dan rumah masihmasuk kategori rumah layak huni.					pendamping sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai
				3	Calon pengganti masuk di Inver berikutnya, sehingga progres fisik sebelumnya belum bisa jalan	Menyusun rencana kerja berbasis <i>cluster</i> waktu penugasan Inver, sehingga ada yang perlu di prioritaskan. Kabupaten/kota yang Inver-nya turun lebih awal diberi target percepatan, sedangkan yang turun belakangan dibuat target khusus sesuai tanggal efektif penugasan.
				4	Penerima bantuan mengundurkan diri setelah proses penetapan dan penyusunan proposal selesai, sehingga diperlukan penggantian calon penerima dan pengulangan tahapan administrasi BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan fasilitator untuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan ketersediaan tenaga tukang di wilayah sekitar
				5	Kepercayaan masyarakat adat/kearifan lokal yang tidak boleh membangun di bulan Muharam	Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk menyesuaikan jadwal

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
						pelaksanaan pembangunan dengan kearifan lokal
					Keterbatasan jumlah toko bahan bangunan yang tersedia di tingkat kecamatan/desa memicu tingginya ketergantungan pasokan pada satu atau dua penyedia saja, minimnya kompetisi pasar ini memicu kendala berupa lemahnya daya tawar program pada saat pelaksanaan pemilihan toko terbuka	Melakukan rapat evaluasi bersama PPK, TFL, KORKAB dan untuk memetakan material yang mengalami kenaikan
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
1	Hasil Verifikasi masih di temukan beberapa calon penerima bantuan tidak memenuhi kriteria seperti tidak memiliki legalitas lahan, tidak memiliki rumah (menumpang), mempertimbangkan untuk di bantu dengan program lain dan rumah masih masuk kategori rumah layak huni.	Berkoordinasi dengan korkab dan TFL untuk mencari calon pengganti dan yang masuk ke data SIBARU	Berita acara verifikasi, dokumentasi dan dokumen verifikasi lainnya	6	- Jarak antara desa/kelurahan jauh - Medan sulit dan akses terbatas	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengelompokan lokasi berdasarkan kedekatan wilayah (klaster), penjadwalan kunjungan secara efisien, serta optimalisasi koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan pendamping sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Terdapat beberapa penerima bantuan di Desa Teratai dengan Desa Pohuwato Timur yang tidak masuk dalam RTRW kawasan permukiman.	Telah berkoodinasi ke dinas Perkim Kabupaten Pohuwato dan telah bersepakat untuk mengganti semua BNBA yang terdata tidak masuk dalam peruntukan kawasan permukiman		7	Calon pengganti masuk di Inver berikutnya, sehingga progres fisik sebelumnya belum bisa jalan	Menyusun rencana kerja berbasis klaster waktu penugasan Inver, sehingga ada yang perlu di prioritaskan. Kabupaten/kota yang Inver-nya turun lebih awal diberi target percepatan, sedangkan yang turun belakangan dibuat target khusus sesuai tanggal efektif penugasan.
2	Masih tedapat beberapa desa yang belum lengkap dokumentasi dan Form II-4 pada link my sharepoint. Serta proses input data ke GO PKP yang belum selesai	Berkordinasi ke Korkab dan TFL untuk segera melengkapi proses pemasukan data pada link my shrepoint. Dan telah menyelesaikan proses input data ke GO PKP	Dokumentansi dan dokumen verifikasi lainnya	8	keterbatasan tukang di beberapa kabupaten/kota	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan fasilitator untuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan ketersediaan tenaga tukang di wilayah sekitar
				9	Kepercayaan masyarakat adat/kearifan lokal yang tidak boleh membangun di bulan Muharam	Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan pembangunan dengan kearifan lokal
				10	Keterbatasan jumlah toko bahan bangunan yang tersedia di tingkat kecamatan/desa memicu tingginya ketergantungan pasokan pada satu atau	Melakukan rapat evaluasi bersama PPK, TFL, KORKAB dan untuk memetakan material yang mengalami kenaikan

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
					dua penyedia saja, minimya kompetisi pasar ini memicu kendala berupa lemahnya daya tawar program pada saat pelaksanaan pemilihan toko terbuka	
				9	Jumlah CPB per TFL tidak ideal	Mengusulkan penambahan TFL
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1	Hasil verifikasi masih di temukan beberapa calon penerima bantuan tidak memenuhi kriteria seperti tidak memiliki rumah (menumpang), dan rumah masih masuk kategori rumah layak huni.	Berkordinasi ke Korkab dan TFL verifikasi di kelurahan lain yang masuk dalam data verifikasi sesuai dengan hasil koordinasidengan Perkim Kota Gorontalo	Berita acara verifikasi, dokumentasi dan dokumen verifikasi lainnya	1	Calon pengganti masuk di Inver berikutnya, sehingga progres fisik sebelumnya belum bisa jalan	Menyusun rencana kerja berbasis klaster waktu penugasan Inver, sehingga ada yang perlu di prioritaskan. Kabupaten/kota yang Inver-nya turun lebih awal diberi target percepatan, sedangkan yang turun belakangan dibuat target khusus sesuai tanggal efektif penugasan.
2	Masih tedapat beberapa desa yang belum lengkap dokumentasi dan Form II-4 pada link my sharepoint. Serta proses input data ke GO PKP yang belum selesai	Berkordinasi ke Korkab dan TFL melengkapi pemasukan data pada link my shrepoint. Menginstruksikan menyelesaikan proses input data ke GO PKP untuk segera proses	dokumentasi dan dokumen lainnya baik <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	2	Penerima bantuan mengundurkan diri setelah proses penetapan dan penyusunan proposal selesai, sehingga diperlukan penggantian calon penerima dan pengulangan tahapan	Berkoordinasi dengan pihak pengusul dan memastikan tidak ada lagi perubahan

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
					administrasi BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.	
				3	keterbatasan tukang di beberapa kabupaten/kota	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan fasilitator untuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan ketersediaan tenaga tukang di wilayah sekitar
				4	Kepercayaan masyarakat adat/kearifan lokal yang tidak boleh membangun di bulan Muharam	Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan pembangunan dengan kearifan lokal
				5	Keterbatasan jumlah toko bahan bangunan yang tersedia di tingkat kecamatan/desa memicu tingginya ketergantungan pasokan pada satu atau dua penyedia saja, minimnya kompetisi pasar ini memicu kendala berupa lemahnya daya tawar program pada saat pelaksanaan pemilihan toko terbuka	Melakukan rapat evaluasi bersama PPK, TFL, KORKAB dan untuk memetakan material yang mengalami kenaikan

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW -1)	Bukti Tindak lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW+I)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
				6	Jumlah CPB per TFL tidak ideal	Mengusulkan penambahan TFL